

ANALISIS DANA OTONOMI KHUSUS DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI ACEH 2020-2025

Evillia Nadara¹⁾, Teuku Zulkarnain²⁾, Fakriah³⁾

^{1),2),3)}Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email : evillianadara126@gmail.com¹⁾, t.zulkarnain1979@gmail.com²⁾, fakriah@pnl.ac.id³⁾

Abstract: *This study aims to analyze the effect of special Autonomy Funds and the Gender Development Indeks (GDI) on sustainable development, measured by the percentage of the poor population in the regencies/cities of Aceh province during the period 2020-2025. This study employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The type of panel data used is an unbalanced panel. Based on the Hausman test results, the best model selected is the Fixed Effect Model (FEM). The results indicate that the Special Autonomy Fund has a positive and significant effect on the percentage of the poor population, with a coefficient value of 0.106014 and a probability value of 0.0000. The Gender Development Index has a negative and significant effect on the percentage of the poor population, with a coefficient value of -1.323186 and a probability value of 0.0000. Simultaneously, the Special Autonomy Fund and the Gender Development Index significantly affect sustainable development, as indicated by a Prob(F-statistic) value of 0.000000. The R-squared value of 0.983260 indicates that 98.32% of the variation in sustainable development, measured by the percentage of the poor population, can be explained by the two independent variables included in the model. This study concludes that improving the quality of gender development can support sustainable development through poverty reduction. Meanwhile, the management of the Special Autonomy Fund needs to be improved to ensure greater effectiveness and more targeted efforts in poverty alleviation in Aceh Province.*

Keywords: *Special Autonomy Fund, Gender Development Index, Percentage Of Poor Population As An Indicator Of Sustainable Development, Panel Data Regression.*

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap pembangunan berkelanjutan yang diukur menggunakan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2020-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Jenis data panel yang digunakan adalah unbalanced panel. Berdasarkan hasil uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin dengan nilai koefisien sebesar 0,106014 dan probabilitas 0,0000. Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif signifikan terhadap

persentase penduduk miskin dengan nilai koefisien sebesar -1,323186 dan probabilitas 0,0000. Secara simultan, Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan Gender berpengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai R-squared sebesar 0,983260 menunjukkan bahwa 98,32% variasi pembangunan berkelanjutan yang diukur menggunakan persentase penduduk miskin dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan gender mampu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Gender, Persentase Penduduk Miskin Sebagai Indikator Dari Pembangunan Berkelanjutan, Regresi Data Panel.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah sebuah proses pembangunan global yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan hak yang dimiliki oleh generasi yang akan datang (United Nations, 2015; Todaro dan Smith, 2015). Di Indonesia, indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah pengurangan angka kemiskinan serta tercapainya keadilan dan kesetaraan gender (Suharto, 2014; Iskandar, 2022).

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memperkuat arah perkembangan tersebut melalui 17 tujuan yang saling berhubungan. Dalam konteks penelitian ini, pengurangan kemiskinan dan kesetaraan gender merupakan bagian penting karena keduanya saling berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Pembangunan yang menghasilkan kemajuan namun tetap adanya masyarakat miskin belum sepenuhnya merefleksikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin sebagai indikator untuk mengukur tingkat pembangunan berkelanjutan. Persentase penduduk miskin dipilih karena kemiskinan mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Semakin sedikit jumlah masyarakat miskin, semakin bagus juga keadaan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Sebaliknya, jika persentase penduduk miskin masih tinggi maka manfaat dari pembangunan berkelanjutan belum terasa secara merata oleh semua masyarakat.

Provinsi Aceh merupakan daerah dengan status kekhususan dan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal khusus, Aceh telah mendapatkan alokasi dana otonomi khusus aceh (DOKA) yang berasal dari APBN sejak tahun 2008-2027 dana ini dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan (Alqarni et al., 2022). Namun, meski menerima dana transfer yang jumlahnya mencapai triliunan setiap tahun, provinsi Aceh masih menghadapi tingkat kemiskinan tertinggi di pulau sumatra (BPS Aceh, 2024; Putra dan Amran, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pengelolaan DOKA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Provinsi Aceh.

Selain aspek keuangan daerah, pencapaian SDGs juga sangat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata, yang diukur menggunakan indeks pembangunan gender (IPG). IPG digunakan untuk mengukur sejauh mana kesetaraan tercapai antara laki-laki dan perempuan dalam tiga bidang yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (KPPPA, 2022; Siregar, 2020). Kesetaraan gender penting karena Ketika perempuan mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi produktif, pendapatan rumah tangga yang kurang mampu akan meningkat, sehingga mempercepat proses penurunan kemiskinan (Riskya, 2023; Maziyyah dan Arif, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh dana otonomi khusus dan indeks pembangunan gender terhadap pembangunan berkelanjutan yang diukur melalui persentase penduduk miskin baik secara parsial maupun simultan, pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2020-2025.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang mengintegrasikan elemen pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan. Dalam konteks SDGs, pengurangan kemiskinan (Tujuan 1) dan kesetaraan gender (Tujuan 5) adalah fondasi penting untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh (Suharto, 2014). Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin distribusi manfaat pembangunan yang adil, baik antar generasi maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Indikator pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase penduduk miskin, yaitu perbandingan jumlah penduduk miskin dengan total penduduk yang dikalikan 100. Perhitungan ini menunjukkan besarnya proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penggunaan indikator ini menegaskan penduduk miskin menjadi ukuran utama dalam menilai pembangunan berkelanjutan, karena mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Semakin rendahnya persentase, semakin baik tingkat pembangunan berkelanjutan yang dicapai. Sebaliknya, semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan belum merata dan masih perlu ditingkatkan.

2. Dana Otonomi Khusus (DOKA)

DOKA adalah metode pengalihan instrumen fiskal positif dari pemerintah ke Aceh untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar Serta meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2022). Berdasarkan UU No. 11/2006 Pasal 183, pengalokasian DOKA diarahkan pada enam sektor yang menjadi prioritas, yaitu infrastruktur, ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan.

Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh harus beroperasi secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat Aceh. Penyaluran dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang diterima oleh Aceh harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam hal ini, pelaksanaan program dan kegiatan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan waktu dalam proses perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk provinsi serta setiap kabupaten/kota, sehingga memenuhi kriteria dan persyaratan yang diterapkan setiap tahun oleh pemerintah Aceh melalui keputusan Gubernur Aceh (Tata *et al.*, 2023).

Dana otonomi khusus tidak digunakan dalam bentuk nilai asli, tetapi sudah ditrasformasikan. Ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Artinya, setiap nilai dana otonomi khusus diubah terlebih dahulu menggunakan fungsi logaritma natural sebelum dimasukkan ke dalam analisis.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan, untuk melihat perbedaan pencapaian dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Indeks pembangunan gender adalah sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pembangunan antara perempuan dan laki-laki seimbang, IPG dihitung dengan membandingkan rasio indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki yang kemudian dikalikan dengan 100 (BPS, 2024). IPG menunjukkan seberapa besar kesenjangan dalam pembangunan gender. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangannya dan semakin baik akses perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan (Setiadi et al., 2020).

Kesetaraan gender yang tercermin melalui nilai IPG memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks pembangunan gender (IPG) menunjukkan tingkat kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Semakin tinggi nilai IPG menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil.

Apabila perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan mendapatkan pekerjaan yang layak, maka kualitas sumber daya manusia perempuan akan meningkat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, perempuan berpendidikan dapat berpartisipasi dalam berbagai sektor, seperti menjadi dosen, guru, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), pengusaha, maupun pemimpin daerah. Peran perempuan dalam berbagai sektor tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, meningkatnya IPG diharapkan dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, IPG dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang mendukung pembangunan berkelanjutan karena mencerminkan pemerataan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

4. Hipotesis

H1 : Dana otonomi khusus dan indeks pembangunan gender secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan pada kab/kota di Provinsi Aceh

H2 : Dana otonomi khusus dan indeks pembangunan gender secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan pada kab/kota di Provinsi Aceh

METODE PENELITIAN

1) Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran (LRA) DJPK kementerian RI dan badan pusat statistik (BPS) Provinsi Aceh pada tahun 2020-2025. Objek penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh menggunakan teknik sampel jenuh. Data berjenis data panel tidak seimbang (*Unbalanced Panel*) karena terdapat beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki pencatatan DOKA lengkap pada tahun tertentu dengan total observasi $N = 99$. Pengujiannya menggunakan aplikasi *Eviews* 13.

2) Operasional Variabel

Variabel penelitian dirumuskan dan diukur sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y) : Pembangunan Berkelanjutan, diukur menggunakan persentase penduduk miskin (%) dari badan pusat statistik (BPS) Provinsi Aceh.
2. Variabel Independen (X1) : Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), diukur melalui Transformasi Logaritma Natural ($\ln DOKA$) untuk menyederhanakan skala data.
3. Variabel Independen (X2) : Indeks Pembangunan Gender (IPG), dihitung dari $(IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ laki-laki}) \times 100$ Dari BPS Provinsi Aceh.

3) Model Regresi data Panel

Persamaan regresi data panel yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PB_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(DOKA)_{it} + \beta_2 IPG_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana i menunjukkan unit kabupaten/kota di Provinsi Aceh, t menunjukkan periode waktu (tahun penelitian) α adalah konstanta, β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi, serta ϵ_{it} adalah error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Statistik Variabel

Tabel 1 ringkasan hasil analisis statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian selama tahun 2020-2025.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif variabel Penelitian

	X1	X2	Y
Mean	21.20282	91.31389	14.60232
Median	21.97673	93.00000	14.45000
Maximum	25.57682	98.20222	20.36000
Minimum	17.19329	77.97000	5.450000
Std. Dev.	3.502121	5.087121	3.403990
Skewness	0.001744	-0.820913	-0.329849
Kurtosis	1.141101	2.707103	2.423027
Jarque-Bera Probability	14.25401 0.000803	11.47319 0.003226	3.168408 0.205111
Sum	2099.079	9040.075	1445.630
Sum Sq. Dev.	1201.956	2536.123	1135.541
Observations	99	99	99

Sumber : hasil Pengolahan Data Eviews 13 (2026)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Otonomi Khusus dan penduduk miskin memiliki variasi data yang cukup besar antar daerah, sehingga menunjukkan adanya perbedaan kondisi pembangunan pada masing-masing kabupaten/kota di Aceh. Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki penyebaran data yang relatif lebih stabil, yang menunjukkan bahwa tingkat pembangunan gender antar daerah di Aceh tidak terlalu berbeda jauh.

B. Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model terbaik menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil pengujian pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel

Jenis Pengujian	Statistik UJI	Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan Model
Uji Chow	Cross-section F	158.043	0.0000	FEM vs CEM
Uji Hausman	Cross-section Random	38.607	0.0000	FEM vs REM

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, Nilai Prob bernilai 0,0000 ($<0,05$), sehingga H_1 diterima dengan demikian, Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model dalam

mengestimasi hubungan variabel dengan mempertimbangkan efek spesifik karakteristik antar kabupaten/kota.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model FEM yang terpilih diuji untuk memenuhi kriteria Ekonometrika melalui pengujian asumsi klasik:

1. Uji Normalitas: Nilai Jarque-Bera sebesar 3,2496 dengan Probability 0,1969 ($> 0,05$), hasil tersebut menunjukkan data residual berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas: korelasi antara X1 dan X2 bernilai -0,0908 ($< 0,80$), menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas
3. Uji Heteroskedastisitas: Uji Glejser menunjukkan Obs*R-squared p-value = 0,2399 ($> 0,05$), menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi: Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,9392 berada pada rentang DU ($1,8263 < DW < 4-DU$ ($2,1737$)) menunjukkan model bebas dari masalah autokorelasi

D. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) dan Uji Hipotesis

Hasil Uji regresi data panel FEM hasil pengujiannya pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji regresi data panel FEM

Variabel	Koefisien	Std Error	t-Statistic	Prob
konstanta (C)	133,1798	10,8571	12,2666	0.0000
Ln DOKA (X1)	0,106	0,019	5,5891	0.0000
IPG (X2)	-1,3232	0,1163	-11,3791	0.0000
F-statistik = 162,6521				$R^2 = 0,9833$
Adjusted $R^2 = 0,9772$				N = 99

Pembahasan

1. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Hasil uji t menunjukkan koefisien DOKA adalah 0,1060 dengan nilai t sebesar 5,5891 dan tingkat signifikan sebesar 0,0000. Hal ini berarti DOKA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DOKA selama tahun pengamatan belum secara langsung mampu

mengurangi kemiskinan, namun secara statistik terjadi bersamaan dengan tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Rahayu dan Febriaty (2021) serta Mukhsin dan Seftarita (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan DOKA belum cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan karena alokasi anggaran masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin atau operasional publik serta proyek fiskal skala besar yang memerlukan waktu lama untuk menyentuh dampak sosial dan ekonomi langsung pada masyarakat miskin. Selain itu, kurangnya perencanaan yang baik, pengawasan yang tidak memadai, serta perbedaan dalam penyaluran dana antar kab/kota membuat DOKA belum mampu bekerja efisien dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh (Putra & Amran, 2023).

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien IPG sebesar -1,3232 nilai t statistik sebesar -11,379 prob sebesar 0,0000. Nilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan dengan arah berlawanan setiap peningkatan 1 poin pada IPG akan mengurangi angka kemiskinan sebanyak 1,3232%, hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan yang diukur menggunakan persentase penduduk miskin di provinsi Aceh.

Hasil ini didukung oleh penelitian Riskya, 2023; Maziyyah 2024 bahwa peningkatan kualitas pembangunan gender yang nyata dapat mengurangi kemiskinan. Peningkatan IPG membuka lebih banyak akses bagi perempuan ke pendidikan, layanan kesehatan dan peluang kerja. Ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, secara efektif membantu keluarga rentan untuk keluar dari garis kemiskinan (Yulistia Devi et al., 2025)

3. Pengaruh Simultan DOKA dan IPG terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Hasil Uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 162,6521 dengan prob 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin dengan R-squared menjadi 0,9833. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, 98,33% perubahan dalam tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Aceh dipengaruhi serta dijelaskan secara kolektif oleh distribusi DOKA dan IPG, sementara 1,67% sisanya berasal dari faktor di luar model yang dianalisis. Penggabungan antara DOKA dan IPG terbukti menjadi aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uji regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) terhadap 23 kab/kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana otonomi khusus Aceh (DOKA) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penentuan program DOKA dalam mengatasi kemiskinan masih memerlukan perbaikan yang mendalam karena alokasi DOKA tidak tepat sasaran untuk masyarakat miskin.
2. Indeks pembangunan gender (IPG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender dapat mengurangi kemiskinan di Aceh.
3. Secara simultan, DOKA dan IPG berpengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Aceh, dengan kontribusi variasi mencapai 98,33%.

Saran

1. Pemerintah daerah Aceh perlu perbaikan dalam alokasi dana DOKA agar lebih berfokus pada program yang membantu mengurangi kemiskinan dengan melibatkan masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja, selain itu pemerintah juga lebih ketat dalam pengawasan dan memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran.
2. Pengarusutamaan Gender pemerintah harus menggabungkan perencanaan anggaran yang memperhatikan gender dalam penggunaan DOKA agar bisa meningkatkan akses pendidikan, pelatihan vokasi dan layanan kesehatan bagi perempuan di seluruh daerah.
3. Peneliti berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel kontrol lain seperti tingkat pengangguran terbuka, inflasi atau investasi agar analisis pembangunan berkelanjutan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). *Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Efektivitas Pembangunan Daerah Aceh*. Banda Aceh: Erlangga.
- Alqarni, A., Zulkifli, & Syahputra, R. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. *Jurnal Sektor Publik dan Otonomi Daerah*, 14(2), 112–125.
- Aulia, R., Rahmad, H., & Fitriani, N. (2024). Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap

- Infrastruktur dan Kesejahteraan Sosial di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–58.
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2024). *Fiscal Decentralization and Subnational Finance in Developing Nations*. New York: Routledge.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hotman, P., & Damanik, L. (2025). Ketimpangan Gender dan Hambatan Sosial Budaya Pembangunan di Wilayah Khusus. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 8(1), 77–89.
- Iskandar, M. (2022). *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Pembangunan Gender Berbasis Data dan Indikator IPG di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Litami, S., Fajar, M., & Hidayat, T. (2023). Efisiensi Penggunaan Dana Transfer Khusus dalam Pembangunan Daerah Otonom. *Jurnal Riset Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 201–215.
- Mardiasmo. (2020). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maziyyah, F., & Arif, M. (2024). Dampak Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan di Kota-Kota Besar Indonesia Tahun 2017–2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 33–46.
- Mukhsin, M. M., & Seftarita, C. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 89–102.
- Putra, A., & Amran, A. (2023). Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Daerah*, 7(3), 140–152.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Aceh. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 19(1), 55–68.
- Riskya, N. (2023). Dampak Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012–2021. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Regional*, 12(1), 15–28.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University

Press.

- Setiadi, H., Aprilianti, D., & Rahmawati, E. (2020). Peran Kesetaraan Gender dalam Mendorong Produktivitas Ekonomi Daerah. *Jurnal Kajian Gender dan Pembangunan*, 4(2), 110–122.
- Siregar, R. (2020). Indeks Pembangunan Gender sebagai Indikator Inklusivitas Pembangunan Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Ekonomi*, 9(2), 95–108.
- Yulistia Devi, A., Pratama, I., & Hasanah, U. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan TPAK Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 11(1), 60–75.